

# **BAB I**

## **PENYAJIAN MASALAH PENELITIAN**

### **I.1 Latar Belakang Penelitian**

Dewasa ini secara luas telah dipahami bahwa pengetahuan sistem informasi penting bagi para manajer sebab kebanyakan organisasi memerlukan sistem informasi agar dapat bertahan hidup dan berhasil baik. Sistem informasi dapat membantu organisasi memperluas jangkauan mereka sampai ke lokasi-lokasi yang jauh, memperoleh bentuk-bentuk dan aliran kerja baru, dan kemungkinan juga dapat mengubah cara berbisnis.

Prespektif bisnis menekankan sifat organisasional dan manajerial dari sistem informasi. Sistem informasi juga menghadirkan solusi manajemen dan organisatoris, berdasarkan teknologi informasi, untuk suatu tantangan yang ada pada lingkungannya. Untuk dapat memahami sepenuhnya tentang sistem informasi, harus dipahami tentang organisasi secara lebih luas, manajemen dan dimensi teknologi informasi.

Sistem Informasi telah menjadi kebutuhan sekaligus menjadi persyaratan bagi organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Secara prinsip, sistem informasi telah menjadi sebuah alat bantu bagi organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu kehadiran sistem informasi menjadi suatu yang penting bagi organisasi. Selain itu, investasi sistem informasi di suatu organisasi relatif besar, terlebih pada suatu organisasi yang intensitas penggunaan teknologi informasinya sangat tinggi. Karena dua alasan yaitu sistem informasi sangat dibutuhkan dan biaya investasi yang besar, maka sebaiknya setiap pengembangan sistem teknologi informasi ini harus berhasil.

Pada awalnya sistem informasi hanya dipandang sebagai alat pengolah data. Namun, dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi, maka peran sistem informasi berubah menjadi penyedia informasi bagi manajemen. Sistem informasi menjadi pendorong utama proses transformasi organisasi. Sistem informasi memberikan imbas penting bagi organisasi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan strategik. Sebagai salah satu aset yang bernilai mahal dan mengandung resiko tinggi, sistem informasi membutuhkan tatakelola yang baik agar selaras dengan seluruh strategi bisnis guna mencapai tujuan organisasi.

Sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya dengan alat bantu selain sistem informasi. Akan tetapi di era *network society* atau yang lebih dikenal dengan masyarakat informasi, sistem informasi merupakan dasar dari prespektif teknologi informasi. Dunia tidak akan mampu menghalangi perkembangan teknologi informasi, sehingga dalam konteks yang lebih luas, perkembangan teknologi informasi telah berdampak dan melahirkan perubahan dramatis dan dinamika dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bahkan menjadi kontributor utama terjadinya proses transformasi dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi.

Salah satu bentuk kehidupan masyarakat informasi ditopang oleh kemajuan teknologi informasi adalah teknologi ini berdampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga salah satu dampaknya adalah terjadinya ledakan informasi (Salmubi 2014, hlm 1-11). Dalam jurnal tersebut dinyatakan bahwa informasi akan menjadi semakin banyak dan kompleks, sehingga alur dari setiap informasi harus dapat dikelompokkan. Menyikapi hal tersebut, tampaknya sistem informasi mampu menjadi alat bantu yang efektif dan efisien dalam mengelompokkan informasi-informasi yang ada, guna mencapai tujuan organisasi.

Sistem informasi bukan hanya sekedar aplikasi atau program komputer, akan tetapi sistem informasi adalah alat bantu manajer untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu Laudon dan Laudon (2014, hlm.48), menjelaskan peranan sistem informasi yang terkait dengan aspek organisasi, manajemen dan teknologi informasi. Hal ini menjelaskan bahwa guna mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, maka perusahaan harus memiliki elemen organisasi, elemen teknologi informasi, elemen manajemen dan elemen sistem informasi.

Lembaga Sandi Negara merupakan suatu unit organisasi yang memiliki visi dan misi organisasi. Misi Lembaga Sandi Negara antara lain mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau Negara (Lembaga Sandi Negara, 2016). Dari salah satu misi tersebut terlihat bahwa bisnis organisasi Lembaga Sandi Negara berada di bidang sistem informasi. Oleh karena itu elemen sistem informasi di Lembaga Sandi Negara harus sangat diperhatikan.

Dalam Laporan Penilaian Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2012 disebutkan bahwa penilaian presentase tingkat pencapaian pelaksanaan setiap program reformasi birokrasi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) adalah 42% (Tim

Penilai RB,2012). Pencapaian tersebut didapat dari rata-rata pencapaian delapan area perubahan. Delapan area perubahan yang dinilai memiliki nilai sempurna untuk masing-masing area adalah 100%. Adapun nilai masing-masing area perubahan yaitu 41.5% untuk manajemen perubahan, 50% untuk peraturan perundangan, 10% untuk organisasi, 82.5% untuk tata laksana, 33.1% untuk SDM, 50% untuk pengawasan, 43% untuk akuntabilitas kinerja, 40% untuk pelayanan publik dan 30% untuk *quick wins*. Untuk hasil laporan penilaian yang dilakukan di tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 60,10% (Tim Penilai RB,2015). Pencapaian tersebut didapat dari area Manajemen Perubahan 78,95%, Penataan Peraturan Undang-Undang 54,25%, Penataan dan Penguatan Organisasi 47,06%, Tatalaksana 66,88%, SDM 61,69%, Akuntabilitas 72,47%, Pengawasan 38,83%, Pelayanan Publik 73,76%. Pencapaian tersebut artinya reformasi birokrasi di Lemsaneg secara umum mengalami kenaikan, walaupun terdapat beberapa target yang belum terealisasi. Salah satu target yang belum tercapai secara maksimal adalah area Tatalaksana.

Area tatalaksana merupakan sistem, proses dan prosedur yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Area tatalaksana merupakan penjelasan dari penggunaan sistem informasi guna mencapai tujuan organisasi. Hal ini menyatakan bahwa elemen sistem informasi tetap diperhatikan selain elemen organisasi, manajemen dan teknologi informasi.

Berdasar laporan Penilaian Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2012 dan tahun 2015, tampak bahwa nilai reformasi birokrasi untuk area tatalaksana mengalami kenaikan dari 33.1 % menjadi 66,88 %. Peningkatan ini menjelaskan tentang diperhatikannya elemen sistem informasi dalam organisasi Lembaga Sandi Negara. Akan tetapi, *range* penilaian tersebut dimulai dari 0% ke 100%, sehingga nilai 66,88% tersebut bisa dikatakan masih jauh dari tujuan, sehingga masih sangat perlu untuk ditingkatkan.

Hasil penilaian area tatalaksana tersebut merupakan hasil penilaian seluruh organisasi Lembaga Sandi Negara. Oleh karena itu penilaian area tatalaksana masing-masing unit kerja sebenarnya belum tentu sama. Salah satu tempat yang menyumbang dalam penilaian area tatalaksana adalah Bagian Kepegawaian Lembaga Sandi Negara.

Bagian Kepegawaian Lembaga Sandi Negara harus memenuhi 3 (tiga) elemen untuk mencapai tujuan Lembaga Sandi Negara secara efektif dan efisien. Dalam

wawancara pendahuluan kepada Kepala Bagian Kepegawaian tanggal 12 Februari 2016, peneliti ingin mengetahui sejauh mana Bagian Kepegawaian dalam memenuhi elemen pencapaian organisasi. Berdasar hasil wawancara kepada Kepala Bagian Kepegawaian pada 12 Februari 2016 menyatakan bahwa :

Area organisasi dan manajemen menjadi konsen utama pada Bagian Kepegawaian sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kepegawaian. Sehingga kedua elemen tersebut menjadi prioritas dalam pemenuhannya. Sedangkan elemen teknologi informasi sangat didukung oleh bagian lain yang mengelola TI dalam pemenuhannya. Dari 4 (empat) elemen tersebut, hanya elemen sistem informasi yang membutuhkan perhatian ekstra.

Hasil wawancara pendahuluan yang lain kepada Kasubbag Adminjahpeg pada tanggal 12 Februari 2016, menunjukkan indikasi yang sama tentang belum terkelolanya pengembangan sistem informasi administrasi pegawai dengan efektif dan efisien. Adapun narasumber menyatakan bahwa :

Didapat hasil bahwa terdapat beberapa jenis sistem informasi administrasi yang dalam proses perencanaan untuk dikembangkan. Akan tetapi pengembangan sistem informasi tersebut tidak dapat sekaligus dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan evaluasi sistem yang harus dilakukan.

Dari berbagai uraian di atas, terlihat bahwa untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien dibutuhkan 3 (tiga) elemen yaitu elemen organisasi, elemen manajemen, elemen teknologi informasi dimana di dalamnya terdapat elemen sistem informasi. Bagian Kepegawaian sebagai salah satu bagian di Lembaga Sandi Negara juga harus memenuhi keempat elemen tersebut guna mendukung tercapainya tujuan Lembaga Sandi Negara. Akan tetapi dari ketiga elemen, hanya 2 (dua) elemen yang sudah diperhatikan untuk dipenuhi, yaitu elemen organisasi, manajemen. Sedangkan elemen teknologi informasi secara khusus elemen sistem informasi belum mendapatkan perhatian yang cukup.

Melihat belum terpenuhinya elemen sistem informasi di Bagian Kepegawaian, dibutuhkan suatu metode yang dapat membantu peningkatan elemen sistem informasi di Bagian Kepegawaian guna memaksimalkan perannya di Lembaga Sandi Negara. Pemenuhan elemen sistem informasi dapat dilakukan dengan menyusun skala prioritas pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi pegawai. Selanjutnya diharapkan dapat mengurangi permasalahan serta dapat disusun sesuai dengan skala kebutuhan yang sesuai. Pelaksanaan analisis pengembangan sistem informasi administrasi pegawai menjadi solusi untuk mengatasi prioritas pengembangan sistem informasi. Namun

prioritas yang ditentukan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi dan sesuai dengan asas manfaat serta biaya, karena apabila tidak sesuai dengan tujuan pengembangan aplikasi sistem informasi, maka aplikasi sistem informasi yang dihasilkan tidak akan memberikan perubahan pada peningkatan pelayanan pegawai. Dengan kata lain, dibutuhkan sebuah *action plan* dalam pemenuhan elemen sistem informasi di Bagian Kepegawaian.

Pembuatan *action plan* dapat dilakukan dengan analisis prioritas pengembangan sistem informasi dengan memperhatikan asas manfaat dan biaya guna menentukan sistem informasi mana yang sesuai untuk dikembangkan terlebih dahulu. Strategi analisis prioritas sistem informasi ini dilakukan sebelum memutuskan sistem informasi apa saja yang akan dikembangkan terlebih dahulu oleh organisasi, hal ini dilakukan agar tidak ada ketimpangan, ketidaksesuaian serta *bugs* dalam pengembangan sistem informasi. Faktanya hingga saat ini belum pernah dibuat suatu *action plan* dalam pembuatan sistem informasi di Bagian Kepegawaian, sehingga perlu dilakukan suatu Analisis Pemilihan Aplikasi Sistem Informasi Di Lingkungan Kepegawaian Lembaga Sandi Negara Dengan Dukungan AHP Dan Analisis Biaya/Keuntungan (Cost/Benefit). Analisis penentuan ini dilakukan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja untuk penyelenggaraan manajemen perkantoran pelayanan prima di Bagian Kepegawaian dengan teknik Analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) serta asas biaya dan manfaat (*cost and benefit*).

## **I.2 Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya pokok permasalahan dan terbatasnya waktu, tenaga, biaya dan sebagainya, maka yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Lokus penelitian terbatas pada Bagian Kepegawaian Lemsaneg, dimana bagian kepegawaian merupakan tempat yang berperan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di area tata laksana bidang SDM.
- b. Pengembangan Sistem informasi yang diteliti adalah sistem informasi yang akan dikembangkan di Bagian Kepegawaian sesuai dengan lingkup dan batas kewenangan yang diemban oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Lemsaneg.

### I.3 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan melalui pertanyaan penelitian:

- a. Bagaimana analisa menentukan prioritas pemilihan sistem informasi administrasi kepegawaian agar dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien?
- b. Bagaimana aspek pemilihan sistem informasi ditinjau dari segi biaya dan manfaat?

### I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian tesis ini adalah :

- 1) Memperjelas bahasa manajemen tentang harapan dan pernyataan kebutuhan informasi manajemen kepada pengembangan sistem informasi administrasi kepegawaian menyangkut penataan strategi prioritas melalui perangkat manajemen AHP.
- 2) Memahami rekomendasi manajemen tentang pengembangan prioritas pengembangan sistem informasi administrasi pegawai dengan memperhatikan asas biaya dan manfaat.

#### b. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperkaya konsep dan teori manajemen yang terkait dengan pendekatan *Cost and Benefit Analysis* dan *Analytical Hierarchy Process* yang meliputi penyusunan prioritas pengembangan sistem informasi.

Manfaat dari penelitian secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada Bagian Kepegawaian, Lemsaneg tentang pentingnya menentukan *action plan* dalam pengembangan sistem informasi administrasi pegawai. Selain itu diharapkan mampu untuk meningkatkan kompetensi peneliti dalam merencanakan pengembangan berbagai sistem informasi di tempatnya bekerja.